



Implementasi Kebijakan Akreditasi dan Dampaknya terhadap Mutu Pendidikan Islam Berbasis Pesantren di MTs Persis Sindangkasih Ciamis

Irman Nurjaman^{1*}, Nu'man Ihsanda², Rizka Husni Maulana³, Nizar Muhammad Fasya⁴, Nina Nafisah⁵, & Ara Hidayat⁶

¹⁴⁵⁶UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

³STAI Nahdatul Ulama, Cianjur, Indonesia

²STAI Putra Galuh, Ciamis, Indonesia

*irman13@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan akreditasi merupakan instrumen penjaminan mutu pendidikan yang dirancang untuk memastikan satuan pendidikan memenuhi standar nasional. Namun, implementasinya sering menghadapi tantangan pada madrasah berbasis pesantren yang memiliki karakteristik kelembagaan khas. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan akreditasi dan dampaknya terhadap mutu pendidikan di MTs Persis Sindangkasih Ciamis. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akreditasi lebih efektif meningkatkan mutu administratif dibandingkan mutu substantif pendidikan. Implementasi cenderung berorientasi pada kepatuhan temporer menjelang akreditasi. Faktor komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana, dan belum terakomodasinya budaya pesantren dalam indikator akreditasi menjadi determinan utama efektivitas kebijakan. Sistem penjaminan mutu internal berperan sebagai variabel mediasi antara kebijakan akreditasi dan mutu pendidikan. Penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan kontekstual untuk penguatan mutu pendidikan Islam berbasis pesantren secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan akreditasi; mutu pendidikan; madrasah; pesantren; penjaminan mutu internal.

ABSTRACT

Accreditation policy serves as an educational quality assurance instrument designed to ensure that educational institutions meet national standards. However, its implementation frequently encounters challenges in pesantren-based madrasahs with distinct institutional characteristics. This study analyzes the implementation of accreditation policy and its impact on educational quality at MTs Persis Sindangkasih Ciamis. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that accreditation policy is more effective in improving administrative quality than substantive educational quality. Implementation tends toward temporary administrative compliance preceding accreditation cycles. Policy communication, limited resources, implementer disposition, and the absence of pesantren cultural values within accreditation indicators emerge as primary determinants of policy effectiveness. The internal quality assurance system functions as a mediating variable between accreditation policy and educational quality. This study offers contextual policy recommendations for sustainably strengthening the quality of pesantren-based Islamic education.

Keywords: Accreditation policy; educational quality; internal quality assurance; madrasah; pesantren.

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan merupakan isu strategis dalam diskursus kebijakan pendidikan global, termasuk dalam konteks pendidikan Islam. Dalam lanskap pendidikan modern, negara-negara di dunia semakin menekankan pentingnya akuntabilitas dan jaminan mutu melalui berbagai instrumen kebijakan, salah satunya adalah sistem akreditasi lembaga pendidikan. Akreditasi dipahami sebagai mekanisme penjaminan mutu eksternal yang dirancang untuk memastikan bahwa satuan pendidikan memenuhi standar minimal yang ditetapkan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (OECD, 2021) (UNESCO, 2023).

Di Indonesia, kebijakan akreditasi madrasah merupakan bagian integral dari sistem penjaminan mutu pendidikan nasional yang berada di bawah koordinasi pemerintah melalui Kementerian Agama dan Badan Akreditasi Nasional. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi administratif, tetapi juga dimaksudkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara substantif, mencakup aspek tata kelola kelembagaan, proses pembelajaran, serta capaian lulusan (Mirsal et al., 2025). Namun, temuan-temuan empiris mutakhir menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi masih menghadapi tantangan mendasar, bahwa orientasi sekolah dalam proses akreditasi masih bersifat administratif dan dokumen-sentris, belum menyentuh esensi peningkatan mutu pembelajaran (Faizal Luqman, 2021)

Kompleksitas implementasi kebijakan akreditasi semakin nyata ketika diterapkan pada sekolah Islam berbasis pesantren. tidak secara langsung membahas akreditasi nasional, tetapi menelusuri tantangan adaptasi pesantren terhadap tuntutan pendidikan formal dan standar nasional. Temuan studi ini mendukung argumen bahwa standar yang seragam (seperti standar pendidikan nasional) tidak selalu langsung cocok dengan kultur dan praktik pedagogis pesantren, sehingga diperlukan adaptasi institusional untuk menyeimbangkan keduanya, tepat untuk menguatkan klaim kamu tentang ketidakselarasan standar akreditasi nasional dan konteks pesantren (Muttaqin, 2025). Ketidaksesuaian ini berpotensi melahirkan kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan akreditasi dan praktik implementasinya di lapangan.

Sejumlah Studi ini menjelaskan bagaimana pesantren mengakomodasi kebijakan pendidikan nasional, mempertahankan peran tradisional sambil menyesuaikan diri dengan tuntutan regulasi. Hasilnya menunjukkan bahwa meski pesantren melaksanakan kebijakan nasional, mereka tetap mempertahankan nilai-

nilai sosial-budaya pesantren secara signifikan menguatkan argumen tentang dilema kebijakan pesantren antara identitas keislaman dan tuntutan administratif (Burga et al., 2019). Akreditasi memang dipandang sebagai instrumen penting untuk legitimasi mutu dan pengakuan publik terhadap lembaga pendidikan. Namun demikian, tekanan administratif yang menyertainya sering kali menggeser fokus lembaga dari upaya penguatan mutu substantif menuju kepatuhan administratif semata. Akibatnya, peningkatan kinerja kelembagaan cenderung bersifat temporer, meningkat menjelang proses akreditasi, tetapi tidak selalu berkelanjutan. Sebenarnya akreditasi digunakan sebagai evaluasi dan dorongan peningkatan kualitas, namun hal tersebut tidak otomatis menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan setelah proses akreditasi berakhir (Halimatus Sakdiyah et al., 2024).

Dalam perspektif analisis kebijakan publik, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi kebijakan. Edwards III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, serta efektivitas struktur birokrasi (Edwards III, G. C, 1980). Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan dan kesesuaian desain kebijakan dengan konteks sosial tempat kebijakan tersebut diimplementasikan (Daniel A. Mazmanian, Paul A. Sabatier ·, 1989). Dalam konteks madrasah berbasis pesantren, faktor lingkungan sosial dan budaya kelembagaan pesantren menjadi variabel krusial yang sering kali belum terakomodasi secara memadai dalam kebijakan akreditasi yang bersifat nasional.

MTs Persis Sindangkasih Ciamis merupakan salah satu madrasah tsanawiyah berbasis pesantren yang berada di bawah naungan organisasi Persatuan Islam (Persis). Madrasah ini mengembangkan model pendidikan yang memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum kepesantrenan, serta menanamkan nilai-nilai disiplin, kemandirian, dan karakter religius dalam kehidupan keseharian peserta didik. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, MTs Persis Sindangkasih telah mengikuti proses akreditasi madrasah sebagai bentuk implementasi kebijakan penjaminan mutu eksternal. Namun demikian, sejauh mana kebijakan akreditasi tersebut berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan secara substantif di lingkungan madrasah berbasis pesantren ini masih belum banyak dikaji secara mendalam.

Kajian-kajian terdahulu tentang pelaksanaan akreditasi sering bersifat administratif dan belum sepenuhnya berdampak substantif terhadap mutu

pembelajaran (Aguslani, 2022), akreditasi madrasah umumnya berfokus pada aspek kepatuhan administratif, capaian peringkat akreditasi, atau kesiapan dokumen kelembagaan (Abidin & Ratnawati, 2024). Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan akreditasi dalam konteks sekolah Islam berbasis pesantren dengan pendekatan analisis kebijakan, serta mengaitkannya secara langsung dengan mutu pendidikan substantif, masih relatif terbatas (Lathifah et al., 2025). Selain itu, data terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga pendidikan masih berada pada kategori akreditasi menengah, yang mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam mewujudkan mutu pendidikan yang optimal secara nasional (Alfiyaturohmaniyah et al., 2023).

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini secara kritis mengkaji hubungan yang kompleks antara implementasi kebijakan akreditasi dan mutu pendidikan yang dihasilkan dalam konteks unik sekolah Islam berbasis pesantren, dengan studi kasus di MTs Persis Sindangkasih Ciamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana kebijakan akreditasi diimplementasikan, dimaknai oleh para aktor kebijakan, serta berinteraksi dengan mekanisme penjaminan mutu internal madrasah (Rahman et al., 2021a).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan akreditasi madrasah dan dampaknya terhadap mutu pendidikan pada sekolah Islam berbasis pesantren. Secara teoretis, studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian analisis kebijakan pendidikan Islam, khususnya dalam memahami dinamika implementasi kebijakan pada lembaga pendidikan berbasis nilai dan budaya religius. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap karakteristik pesantren, sehingga kebijakan akreditasi tidak semata berfungsi sebagai instrumen kepatuhan administratif, tetapi benar-benar menjadi sarana strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan akreditasi madrasah dan dampaknya terhadap mutu pendidikan dalam konteks sekolah Islam berbasis pesantren. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas proses kebijakan, dinamika aktor, serta makna yang dilekatkan pada praktik akreditasi dalam lingkungan pendidikan yang sarat dengan nilai dan tradisi keislaman. Melalui pendekatan ini, fenomena kebijakan tidak dipahami sebagai

variabel terpisah, melainkan sebagai proses sosial yang berlangsung dalam konteks tertentu (John W. Creswell & Cheryl N. Poth, 2018).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan MTs Persis Sindangkasih Ciamis sebagai lokus penelitian. Studi kasus dipandang relevan karena penelitian ini berfokus pada satu institusi pendidikan yang memiliki karakteristik khas sebagai madrasah berbasis pesantren. Desain ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara kebijakan akreditasi, praktik implementasi di tingkat institusi, serta implikasinya terhadap mutu pendidikan secara kontekstual dan holistik (Yin, 2018). Pemilihan MTs Persis Sindangkasih didasarkan pada perannya sebagai madrasah yang secara aktif mengikuti kebijakan akreditasi nasional sekaligus mempertahankan identitas pesantrenan dalam pengelolaan pendidikan.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan akreditasi. Informan utama meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum dan mutu, guru, tenaga kependidikan, serta pengelola pesantren yang berinteraksi dengan sistem pendidikan formal. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai bagaimana kebijakan akreditasi dipahami, dijalankan, dan dinilai dampaknya terhadap mutu pendidikan di madrasah berbasis pesantren (Rahman et al., 2021b).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan para aktor kebijakan terkait proses akreditasi serta perubahan yang dirasakan dalam praktik pendidikan. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung praktik pembelajaran, tata kelola madrasah, serta budaya kelembagaan yang berkembang dalam konteks pesantren. Sementara itu, analisis dokumen difokuskan pada dokumen akreditasi, evaluasi diri madrasah, kurikulum, dan kebijakan internal penjaminan mutu, guna menelaah bagaimana standar akreditasi diterjemahkan ke dalam praktik administratif dan pedagogis (Brinkmann, 2023).

Data yang terkumpul dianalisis secara tematik dengan melalui tahapan reduksi data, pengelompokan kode, penemuan tema, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif, dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori implementasi kebijakan, khususnya faktor komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III, serta kesesuaian kebijakan dengan

konteks sosial sebagaimana ditegaskan oleh Mazmanian dan Sabatier. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas implementasi kebijakan akreditasi dalam konteks madrasah berbasis pesantren (Daniel A. Mazmanian, Paul A. Sabatier, 1989), (Fullerton, 2025).

Keabsahan data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Selain itu, peneliti melakukan member checking kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian antara temuan penelitian dan pengalaman empiris mereka. Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis sebagai bagian dari audit trail untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi penelitian (Marian Carcary, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan sadar dari seluruh informan, kerahasiaan identitas, serta penggunaan data secara bertanggung jawab. Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid dan bermakna dalam menjelaskan dinamika implementasi kebijakan akreditasi serta dampaknya terhadap mutu pendidikan pada sekolah Islam berbasis pesantren.

LANDASAN TEORITIS

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan apakah tujuan normatif suatu kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik nyata. Edwards III (1980) merumuskan model implementasi kebijakan yang menekankan empat faktor determinan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif mensyaratkan agar kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan dipahami oleh seluruh aktor yang terlibat. Tanpa kejelasan komunikasi, pelaksana kebijakan akan menghadapi ambiguitas yang berpotensi menghasilkan distorsi dalam implementasi. Sumber daya mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan informasi yang cukup. Disposisi atau sikap pelaksana berkaitan erat dengan komitmen, motivasi, dan pemahaman pelaksana terhadap substansi kebijakan. Adapun struktur birokrasi meliputi mekanisme koordinasi, prosedur operasi standar, serta

fragmentasi kewenangan yang dapat memengaruhi efisiensi pelaksanaan kebijakan (Edwards III, G. C, 1980).

Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (1989) mengembangkan kerangka analisis implementasi yang menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan, kesesuaian desain kebijakan dengan kondisi lapangan, serta kapasitas lembaga pelaksana. Mereka membedakan antara variabel yang dapat dikendalikan oleh pembuat kebijakan dan variabel lingkungan yang berada di luar kendali langsung. Dalam konteks madrasah berbasis pesantren, faktor lingkungan sosial-budaya menjadi variabel yang kerap tidak diperhitungkan secara memadai dalam desain kebijakan nasional. Pendekatan implementasi berbasis konteks (context-sensitive implementation) menegaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas desainnya, melainkan juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut responsif terhadap keunikan institusi pelaksana (Daniel A. Mazmanian, Paul A. Sabatier, 1989). Dunn (2017) menambahkan bahwa analisis kebijakan yang komprehensif harus mampu mengidentifikasi kesenjangan antara policy intent dan policy outcome, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang kontekstual dan berbasis bukti (Dunn, 2017).

Kebijakan Akreditasi sebagai Instrumen Penjaminan Mutu Eksternal

Akreditasi merupakan mekanisme penjaminan mutu eksternal yang dirancang untuk memverifikasi bahwa satuan pendidikan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam perspektif OECD (2021), akreditasi berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik sekaligus katalisator peningkatan mutu berkelanjutan. Sistem akreditasi yang efektif tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga formatif—mendorong institusi untuk melakukan refleksi diri, perencanaan perbaikan, dan penguatan kapasitas secara sistematis. UNESCO (2023) menegaskan bahwa penjaminan mutu eksternal harus didesain secara inklusif dengan mengakomodasi keragaman konteks institusional agar tidak menghasilkan standarisasi yang kontraproduktif bagi lembaga pendidikan dengan karakteristik khusus.

Di Indonesia, akreditasi madrasah diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) berdasarkan delapan standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan. Kebijakan akreditasi ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu

pendidikan nasional. Namun demikian, riset terbaru menunjukkan bahwa implementasi akreditasi di banyak lembaga masih bersifat event-based compliance, yakni intensitas persiapan akreditasi meningkat tajam menjelang penilaian, tetapi tidak diikuti oleh transformasi mutu yang berkelanjutan pasca-akreditasi (Halimatus Sakdiyah et al., 2024). Fenomena ini mengindikasikan adanya disonansi antara fungsi normatif akreditasi sebagai instrumen mutu dan fungsi pragmatismenya sebagai mekanisme legitimasi kelembagaan.

Konsep Mutu Pendidikan Islam dan Pendekatan Human-Centered

Mutu pendidikan dalam perspektif Islam tidak dapat dipahami secara reduktif sebatas capaian akademik atau kepatuhan administratif. Edward Sallis (2002) dalam *Total Quality Management in Education* membedakan antara mutu absolut (standar yang ditetapkan secara eksternal) dan mutu relatif (kesesuaian dengan tujuan dan konteks institusi). Dalam konteks pendidikan Islam, mutu mencakup dimensi intelektual (‘aqliyyah), spiritual (rūḥiyyah), dan moral (akhlāqiyah) yang terintegrasi dalam proses tarbiyah. Mutu pendidikan Islam tidak hanya diukur dari output akademis, tetapi dari sejauh mana proses pendidikan mampu membentuk insan kamil yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia.

Lathifah et al. (2025) menekankan bahwa dalam konteks pesantren, konsep mutu harus dipahami secara holistik dengan mengintegrasikan modernisasi kelembagaan dan adaptabilitas budaya. Pesantren yang bermutu bukan semata pesantren yang memiliki dokumen administrasi lengkap, melainkan pesantren yang mampu menghasilkan lulusan dengan karakter religius yang kuat, kecakapan intelektual yang memadai, dan kemampuan adaptasi terhadap tantangan zaman. Perspektif ini menegaskan bahwa standar mutu eksternal yang seragam perlu dilengkapi dengan standar mutu internal yang kontekstual dan berbasis nilai-nilai pendidikan Islam (Lathifah et al., 2025).

Karakteristik Kelembagaan Pesantren dan Tantangan Standardisasi

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki karakteristik kelembagaan yang khas, meliputi kepemimpinan kiai yang karismatik, kurikulum berbasis kitab kuning, budaya tarbiyah yang menekankan keteladanan, serta sistem asrama yang mengintegrasikan pembelajaran formal dan informal secara total. Burga et al. (2019) menunjukkan bahwa pesantren pada dasarnya telah melakukan akomodasi terhadap kebijakan pendidikan nasional dengan mempertahankan nilai-nilai sosial-budaya keislaman secara signifikan di tengah

tuntutan regulasi. Ketegangan antara identitas kultural pesantren dan tuntutan standarisasi nasional menciptakan dilema institusional yang kompleks: mengikuti standar akreditasi berarti menyesuaikan diri dengan logika birokrasi formal, sementara mempertahankan identitas pesantren berarti mempertahankan praktik pendidikan yang tidak selalu terukur oleh instrumen akreditasi konvensional (Burga et al., 2019).

Muttaqin (2025) lebih lanjut menegaskan bahwa adaptasi institusional pesantren terhadap standar pendidikan nasional tidak berlangsung secara linier, melainkan melalui proses negosiasi yang dinamis antara tuntutan regulasi dan nilai-nilai tradisi. Dalam proses ini, pesantren menjalankan strategi selektif, yakni mengadopsi aspek-aspek formal yang diperlukan untuk kepatuhan regulasi sambil mempertahankan substansi pendidikan khas pesantren. Implikasinya, indikator akreditasi yang seragam dan berbasis standar formal cenderung tidak mampu menangkap kedalaman mutu substantif yang dihasilkan oleh sistem pendidikan pesantren (Muttaqin, 2025).

Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai Mediator Kebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan mekanisme institusional yang dibangun dari dalam lembaga untuk memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung secara konsisten sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan. Dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan, SPMI berperan sebagai jembatan antara kebijakan mutu eksternal dan praktik pendidikan di tingkat kelas. Kajian *Exploring Internal Quality Assurance System for Pesantren in Indonesia* (2022) menemukan bahwa pesantren yang memiliki SPMI yang terstruktur dan terinstitusionalisasi dengan baik menunjukkan respons yang lebih positif dan produktif terhadap kebijakan akreditasi eksternal. Sebaliknya, lembaga yang SPMI-nya lemah cenderung terjebak pada pola kepatuhan temporer tanpa perubahan mutu yang substansial.

Octivani et al. (2024) menegaskan bahwa penguatan standar manajemen pendidikan pada madrasah tsanawiyah harus bertumpu pada penguatan kapasitas internal lembaga, bukan semata pada pemenuhan indikator eksternal. Pengelolaan pendidikan yang berbasis mutu internal memungkinkan lembaga untuk secara proaktif merespons tantangan, melakukan evaluasi diri secara periodik, dan mengembangkan program perbaikan yang berakar pada kebutuhan nyata peserta didik dan komunitas. Dengan demikian, SPMI yang kuat menjadi prasyarat bagi transformasi mutu yang berkelanjutan, dan bukan sekadar pelengkap administratif

dalam proses akreditasi (Octivani et al., 2024).

Kerangka Teoritis Integratif

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas, penelitian ini membangun kerangka analisis integratif yang memadukan teori implementasi kebijakan Edwards III dengan pendekatan mutu pendidikan Islam yang kontekstual. Kerangka ini menempatkan kebijakan akreditasi sebagai input kebijakan, implementasi kebijakan sebagai proses yang dipengaruhi oleh empat faktor (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan budaya pesantren), serta SPMI sebagai variabel moderator yang menentukan apakah implementasi kebijakan menghasilkan mutu administratif semata atau mutu substantif yang berkelanjutan. Budaya pesantren berperan sebagai variabel kontekstual yang mewarnai seluruh proses implementasi dan harus diperhitungkan dalam setiap analisis efektivitas kebijakan akreditasi madrasah berbasis pesantren.

Kerangka ini mengandung implikasi teoritis penting: bahwa efektivitas kebijakan akreditasi tidak dapat dinilai semata dari capaian skor atau peringkat akreditasi yang diperoleh lembaga, melainkan harus dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mendorong perubahan nyata dalam kualitas pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, dan peningkatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Dalam konteks madrasah berbasis pesantren, pendekatan akreditasi yang ideal adalah pendekatan yang tidak hanya mengukur kepatuhan terhadap standar formal, tetapi juga mengakui dan menghargai keunikan pedagogis pesantren sebagai kekuatan mutu yang tidak tergantikan (Rahman et al., 2021a). Dengan demikian, kerangka teoritis integratif ini memberikan pijakan konseptual yang kuat bagi analisis empiris yang dilakukan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Akreditasi di MTs Persis Sindangkasih

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan akreditasi dipahami oleh para aktor madrasah sebagai kewajiban struktural yang harus dipenuhi untuk menjaga legitimasi dan keberlangsungan lembaga. Kepala madrasah menyatakan bahwa akreditasi merupakan "*pintu masuk kepercayaan publik*" dan berpengaruh langsung terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas madrasah.

Namun demikian, implementasi kebijakan akreditasi lebih banyak dimaknai sebagai proses administratif berbasis dokumen, terutama menjelang masa penilaian. Guru dan tenaga kependidikan mengungkapkan bahwa aktivitas

penyusunan dokumen, pelaporan, dan eviden akreditasi meningkat secara signifikan dalam periode tertentu, sementara pada masa pasca-akreditasi intensitas tersebut cenderung menurun.

Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan akreditasi bersifat event-based compliance, bukan proses mutu yang berkelanjutan. Pola ini sejalan dengan temuan (Rahman et al., 2021c) dan (Halimatus Sakdiyah et al., 2024) yang menegaskan bahwa akreditasi sering kali mendorong kepatuhan jangka pendek dibandingkan transformasi mutu jangka panjang.

Tabel 1.

Ringkasan Temuan Implementasi Kebijakan Akreditasi

Aspek Implementasi	Temuan Wawancara
Pemahaman kebijakan	Dipahami sebagai kewajiban administratif
Pola pelaksanaan	Intensif menjelang akreditasi
Fokus utama	Dokumen dan eviden penilaian
Keberlanjutan	Lemah pasca-akreditasi

Sumber: Observasi Penulis

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Analisis hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan akreditasi dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang selaras dengan kerangka Edwards III, namun dengan tambahan dimensi kontekstual pesantren.

Pertama, faktor komunikasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan akreditasi dinilai cukup jelas secara teknis, namun belum menyentuh aspek filosofis dan substansial mutu pendidikan. Akibatnya, pemahaman pelaksana lebih terfokus pada “apa yang harus dilaporkan” dibandingkan “apa yang harus diperbaiki”.

Kedua, faktor sumber daya. Keterbatasan jumlah guru, beban kerja administratif yang tinggi, serta keterbatasan pelatihan mutu berkelanjutan menjadi hambatan utama. Guru mengungkapkan bahwa tuntutan administratif sering mengurangi waktu refleksi dan inovasi pembelajaran.

Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana. Terdapat komitmen tinggi untuk mencapai nilai akreditasi yang baik, tetapi orientasi tersebut lebih bersifat instrumental daripada pedagogis.

Keempat, budaya pesantren. Ini merupakan temuan penting penelitian. Nilai-nilai tarbiyah, keteladanan, dan pembinaan karakter religius menjadi kekuatan utama madrasah, namun belum terakomodasi secara memadai dalam indikator akreditasi nasional. Akibatnya, banyak praktik baik pesantren yang tidak

terdokumentasi dan tidak dinilai secara formal.

Tabel 2.

Faktor Implementasi Kebijakan Akreditasi

Faktor	Kondisi di MTs Persis Sindangkasih
Komunikasi	Jelas secara teknis, lemah secara substantif
Sumber daya	Terbatas dan administratif overload
Disposisi	Komitmen tinggi, orientasi jangka pendek
Budaya pesantren	Kuat secara praksis, lemah secara formal

Sumber: Observasi Penulis

Dampak Akreditasi terhadap Mutu Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara mutu administratif dan mutu substantif. Dari sisi mutu administratif, akreditasi memberikan dampak positif berupa:

Tertibnya tata kelola kelembagaan, Ketersediaan dokumen perencanaan, Peningkatan kesadaran terhadap standar nasional pendidikan.

Namun, dari sisi mutu substantif, dampak akreditasi relatif terbatas. Inovasi pembelajaran tidak meningkat secara signifikan, dan penguatan karakter religius—meskipun kuat dalam praktik keseharian pesantren—tidak terintegrasi secara sistemik dengan kebijakan mutu formal.

Hal ini memperkuat temuan Asy'ari et al. (2021) dan “Exploring Internal Quality Assurance System for Pesantren in Indonesia” (“Exploring Internal Quality Assurance System for Pesantren in Indonesia,” 2022) bahwa sistem mutu eksternal belum sepenuhnya selaras dengan logika mutu internal pesantren.

Tabel 3.

Dampak Akreditasi terhadap Mutu Pendidikan

Dimensi Mutu	Dampak
Mutu administratif	Meningkat signifikan
Mutu pembelajaran	Relatif stagnan
Mutu karakter religius	Kuat tetapi tidak terukur
Keberlanjutan mutu	Belum konsisten

Sumber: Observasi Penulis

Akreditasi antara Kepatuhan Administratif dan Mutu Substantif

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi di MTs Persis Sindangkasih lebih dominan menghasilkan kepatuhan administratif dibandingkan peningkatan mutu substantif. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan klasik antara policy intent dan policy outcome, sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (Dunn, 2017) dan Mazmanian dan Sabatier (1989).

Dalam konteks pesantren, kesenjangan ini diperparah oleh tidak sinkronnya indikator akreditasi dengan nilai dan praktik pendidikan pesantren. Akreditasi belum sepenuhnya mampu menangkap dimensi mutu non-kognitif yang menjadi inti pendidikan Islam.

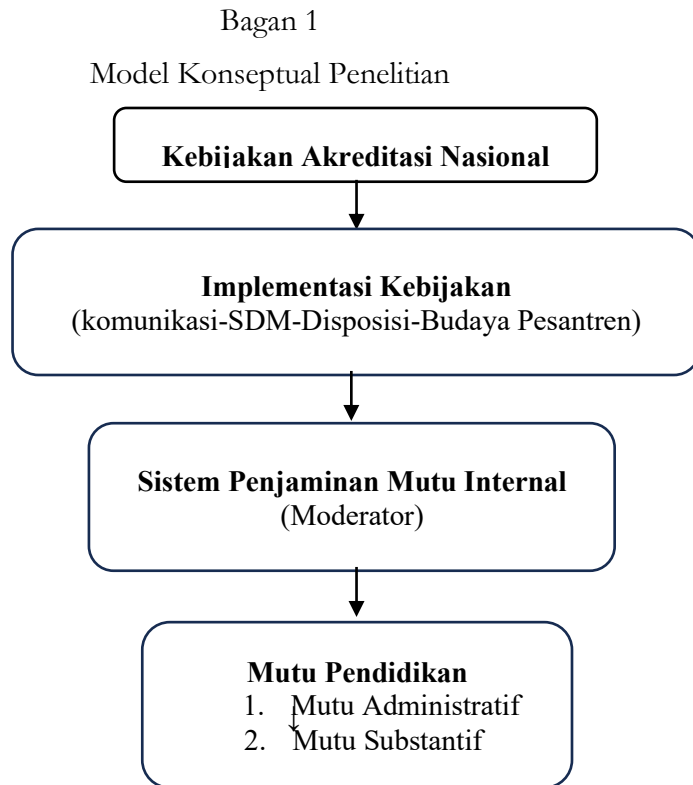
Peran Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai Variabel Kunci

Hasil penelitian menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu internal berperan sebagai variabel penentu (moderator) dalam efektivitas kebijakan akreditasi. Ketika sistem mutu internal lemah dan bersifat insidental, akreditasi hanya menghasilkan peningkatan mutu temporer.

Temuan ini memperkuat argumen Octivani et al. (Octivani et al., 2024) bahwa penguatan mutu madrasah berbasis pesantren harus dimulai dari integrasi antara sistem mutu internal dan kebijakan eksternal.

Model Konseptual Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan model konseptual sebagai berikut:



Sumber: Observasi Penulis

Tabel 4.

Ringkasan Model Konseptual Hasil Penelitian	
Komponen	Peran
Kebijakan akreditasi	Input kebijakan
Implementasi	Proses mediasi
Mutu internal	Moderator
Budaya pesantren	Variabel kontekstual
Mutu pendidikan	Output kebijakan

Sumber: Observasi Penulis

Model ini memberikan kontribusi konseptual dengan menegaskan bahwa budaya pesantren dan sistem mutu internal merupakan variabel krusial yang harus diintegrasikan dalam analisis kebijakan akreditasi madrasah.

PENUTUP

Penelitian ini mengkaji secara kritis implementasi kebijakan akreditasi dan dampaknya terhadap mutu pendidikan pada sekolah Islam berbasis pesantren dengan studi kasus di MTs Persis Sindangkasih Ciamis. Berdasarkan temuan empiris hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dapat disimpulkan bahwa kebijakan akreditasi telah berfungsi secara efektif sebagai instrumen penjaminan mutu administratif, namun belum sepenuhnya berhasil mendorong peningkatan mutu pendidikan substantif yang berkelanjutan.

Implementasi kebijakan akreditasi di MTs Persis Sindangkasih cenderung bersifat kepatuhan administratif yang bersifat temporer, terutama terfokus pada pemenuhan dokumen dan eviden penilaian menjelang proses akreditasi. Pola ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan—yakni peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan—dan praktik implementasi di tingkat satuan pendidikan. Faktor-faktor implementasi seperti komunikasi kebijakan yang teknokratis, keterbatasan sumber daya manusia, beban administratif guru, serta orientasi jangka pendek pelaksana kebijakan turut memengaruhi kondisi tersebut.

Temuan penting penelitian ini adalah peran budaya pesantren sebagai variabel kontekstual yang belum terakomodasi secara optimal dalam sistem akreditasi nasional. Nilai-nilai tarbiyah, keteladanan, dan pembinaan karakter religius yang menjadi kekuatan utama madrasah berbasis pesantren tidak sepenuhnya tercermin dalam indikator penilaian akreditasi. Akibatnya, mutu substantif yang berkembang secara kultural dan praksis tidak mendapatkan pengakuan formal dalam sistem penjaminan mutu eksternal.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu internal madrasah merupakan faktor kunci yang memediasi efektivitas kebijakan akreditasi. Ketika sistem mutu internal belum terlembagakan secara konsisten dan berkelanjutan, dampak kebijakan akreditasi terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik menjadi terbatas. Dengan demikian, kebijakan akreditasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen transformasi mutu pendidikan Islam berbasis pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., & Ratnawati, R. (2024). Manajemen Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Huda Pragaan Sumenep Di Era 5.0. *Journal Of*

- Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 7(1), 96–105.
<https://doi.org/10.31539/alignment.v7i1.9507>
- Aguslani, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Madrasah Di Cianjur. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 16(2), 205–213.
<https://doi.org/10.38075/tp.v16i2.298>
- Alfiyaturohmaniyah, S., Warsiyah, W., & Muflihini, A. (2023). Strategies of Islamic Schools in Preparing for Accreditation A (Case Study of Muhammadiyah 05 Elementary School in Semarang). *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 6(2), 130.
<https://doi.org/10.30659/jspi.v6i2.34786>
- Brinkmann, S. (2023). *Qualitative Interviewing: Conversational Knowledge Through Research Interviews (2nd ed.)*. Oxford University Press New York.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780197648186.001.0001>
- Burga, M. A., Arsyad, A., Damopolii, M., & Marjuni, A. (2019). Akomodasi Pesantren Terhadap Kebijakan Pendidikan Nasional. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 4(1), 62.
<https://doi.org/10.22515/attarbawi.v4i1.1560>
- Daniel A. Mazmanian, Paul A. Sabatier . (1989). *Implementation and Public Policy*. Bloomsbury Academic.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Exploring Internal Quality Assurance System for Pesantren in Indonesia. (2022). *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(16).
<https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i16.5606>
- Faizal Luqman. (2021). Strategi Optimalisasi Hasil Akreditasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Darul Amin Aceh Tenggara. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 12(1), 103–116.
<https://doi.org/10.47766/itqan.v12i1.162>
- Fullerton, A. H. (2025). Michael HILL & Peter HUPE, Implementing Public Policy (4th ed.). *International Review of Public Policy*, 7(2).
<https://doi.org/10.4000/14ge9>
- Halimatus Sakdiyah, Pramudita Retno Palupi, & Indah Saputri. (2024). Efektivitas Akreditasi Sekolah sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, 1(4), 29–44.
<https://doi.org/10.61132/jupenkei.v1i4.73>

- John W. Creswell & Cheryl N. Poth. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications, Inc.
- Lathifah, Z. K., Fauziah, R. S. P., Rusli, R. K., Roestamy, M., Martin, A. Y., Indra, S., & Suherman, U. (2025). Quality Assurance in Pesantren: Modernization, Adaptability, and Integration into Indonesia's Education System. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 101–114. <https://doi.org/10.15575/jpi.v11i1.43951>
- Marian Carcary. (2021). The Research Audit Trail: Methodological Guidance for Application in Practice. *Electronic Journal of Business Research Methods*, 18(2). <https://doi.org/10.34190/JBRM.18.2.008>
- Mirsal, I., As, A., Sartina, K., Irwansuri, Z., Rusdi, M., Noviyani, R., & Akbar, M. A. (2025). Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Dayah di Aceh: Studi terhadap Efektivitas dan Dampaknya. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 16(1), 50–64. <https://doi.org/10.47766/itqan.v16i1.6076>
- Muttaqin, A. I. (2025). Institutional Adaptation of Islamic Boarding Schools in Indonesia: Balancing Tradition and Modern Education. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(3), 1016–1029. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v9i3.11585>
- Octivani, A. R., Prianto, B., & Widjajani, R. (2024). Standards of Education Management in the Quality of Tsanawiyah Madrasah. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 10(08), 27–36. <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2024.8.4>
- OECD. (2021). *Accreditation and quality assurance at universities*. OECD Publishing.
- Rahman, T., Wasliman, I., Muttaqien, K., & Sauri, R. S. (2021a). Accreditation Policies Implementation to Improve Performance Quality in Madrasah. *International Journal Of Educational Review*, 3(2), 124–144. <https://doi.org/10.33369/ijer.v3i2.15601>
- Rahman, T., Wasliman, I., Muttaqien, K., & Sauri, R. S. (2021b). Accreditation Policies Implementation to Improve Performance Quality in Madrasah. *International Journal Of Educational Review*, 3(2), 124–144. <https://doi.org/10.33369/ijer.v3i2.15601>
- Rahman, T., Wasliman, I., Muttaqien, K., & Sauri, R. S. (2021c). Accreditation Policies Implementation to Improve Performance Quality in Madrasah. *International Journal Of Educational Review*, 3(2), 124–144. <https://doi.org/10.33369/ijer.v3i2.15601>
- Robert K. Yin. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods*. SAGE Publications.

Irman Nurjaman, Rizka Husni Maulana, Nizar Muhammad Fasya, Nu'man Ihsanda, Nina Nafisah, & Ara Hidayat

UNESCO. (2023). *External Quality Assurance in Higher Education: Making Choices*.
UNESCO IIEP.